

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

##### 1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen secara etimologis berasal dari bahasa latin, *manus+agere*. *Manus* berarti tangan, sedangkan *agere* berarti melakukan. Maka jika digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* di terjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda, *management*, *manager*, untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

George R. Terry dalam Moh. Jamaluddin Imron menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang mencantumkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasi.<sup>10</sup>

Menurut Syafaruddin sebagaimana dikutip oleh Sri Winarsih<sup>11</sup> mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien menjadi Suatu proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang

---

<sup>10</sup> Moh Jamaluddin Imron, "Manajemen Pembiayaan Sekolah," *AL-IBRAH* 1, no. 1 (2016): 69–93.

<sup>11</sup> Sri Winarsih, "Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah," 2016, 124–35.

sudah ada melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efektif dan efisien.

Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang administrasi pembelajaran yang secara khusus menanggulangi tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki serta digunakan dalam lembaga Pendidikan.<sup>12</sup>

Menurut Said dalam jurnal Siska Yulia Weny manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam mendukung jalannya pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.<sup>13</sup>

Pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam kelangsungan penyelenggaraan pendidikan disekolah. Pembiayaan Pendidikan juga merupakan suatu proses pengalokasian seluruh sumber daya yang dimiliki pada program-program pelaksanaan proses belajar mengajar. Pembiayaan pendidikan merupakan suatu komponen dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi selalu terhubung dengan kegiatan inti atau kegiatan utama. Dalam administrasi sekolah, kegiatan utama adalah proses pembelajaran. Setidaknya pembiayaan pendidikan harus dilihat pada sedemikian rupa sehingga dana yang terlibat dapat menunjang terciptanya kegiatan belajar mengajar yang efektif .<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ermatati Hatta et al., "Pelatihan Dan Pembenahan Manajemen Keuangan Dan Administrasi Pada Yayasan PAUD Dan TK Musa Enda Padang," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 13, no. 2 (2018): 17–24.

<sup>13</sup> Weny, Siska Yulia. "Manajemen Keuangan Pada Sekolah Dasar Untuk Meminimalkan Pajak Yang Terutang." *SITTAH: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2021): 19-34.

<sup>14</sup> Josef Papilaya, *MANAJEMEN Pembiayaan Pendidikan* (CV. AZKA PUSTAKA, 2022).

Pembiayaan Pendidikan memerlukan sistem manajemen yang baik, Dalam penyelenggaraan pendidikan, keterkaitan dengan manajemen pendidikan sangat penting. Keuangan dan pembiayaan menjadi faktor krusial yang tak terpisahkan dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan. Menurut Mulyono yang dikutip oleh Ahmad Munir menyatakan bahwa Manajemen pembiayaan merupakan suatu aktivitas pengelolaan biaya agar berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol. Maka, kegiatan masing-masing dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan baik dari pihak lembaga yang bersifat profit maupun profit.<sup>15</sup>

Menurut Mulyono manajemen keuangan dibagi menjadi tiga yaitu: Perencanaan Finansial (*Budgeting*), pelaksanaan anggaran (*implementation Invalues Accounting*), Evaluasi (*Evaluation Involues*).<sup>16</sup>

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan adalah metode untuk memperoleh serta menyusun mengenai keuangan melalui sumber daya manusia yang mengatur, melaksanakan dan memperbaiki sehingga terlaksananya pendidikan diinginkan.

## 2. Jenis Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Menurut Chon dalam buku Makmur Syukri jenis pembiayaan pendidikan secara garis besar terdiri dari biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).<sup>17</sup>

### a. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

---

<sup>15</sup> Ahmad Munir, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam," *At-Ta'dib* 8, no. 2 (2013).

<sup>16</sup> "Manajemen Pembiayaan Pendidikan," n.d.

<sup>17</sup> Makmur Syukri, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, n.d.

Biaya langsung merupakan pengeluaran yang muncul secara langsung karena adanya suatu aktivitas yang dibiayai. Ketika aktivitas tersebut tidak ada, maka biaya langsung tidak terjadi. Sehingga, biaya langsung dapat dengan mudah dihubungkan dengan aktivitas yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara biaya langsung departemen adalah semua pengeluaran yang timbul di dalam suatu departemen tertentu.

b. Biaya tidak langsung (*Indirect Cost*)

Biaya tidak langsung merujuk pada pengeluaran yang tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas yang dibiayai. Dalam konteks produk, biaya tidak langsung juga dikenal sebagai biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik.<sup>18</sup>

### 3. Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

a) Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Menurut Johnson mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan ini perencanaan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah yang efektif dan efisien.

Perencanaan pembiayaan berbasis sekolah setidaknya mencakup dua kegiatan yaitu penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS).

---

<sup>18</sup> Ajang Mulyadi, Akuntansi Manajemen..., hal 25

### 1) Penyusunan anggaran keuangan sekolah

Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya.<sup>19</sup> Sedangkan pada proses pengembangan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) melewati beberapa tahapan yang sesuai dengan satuan kerja yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan, anggaran disusun langsung oleh staf pimpinan atau atasan dari suatu bagian. Adapun prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran:

- a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi;
- b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran;
- c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi;
- d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari Tingkat atas sampai yang paling bawah;

Menurut Nanang Fattah, penyusunan anggaran keuangan ada beberapa tahapan guna mencapai penyusunan anggaran yang optimal. Tahapan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.

---

<sup>19</sup> Fattah, Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, hal.47

- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
- c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f. Melakukan revisi usulan anggaran
- g. Persetujuan usulan anggaran
- h. Pengesahan anggaran<sup>20</sup>

## 2) Pengembangan rencana anggaran sekolah

Proses pengembangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) pada umumnya melalui langkah-langkah prosedur yaitu<sup>21</sup>:

- a. Pada tingkat kerja kelompok

Kelompok kerja yang terdiri dari staf administrasi madrasah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menghitung kebutuhan biaya yang diperlukan. Setelah menganalisis kebutuhan tersebut, kelompok tersebut akan memprioritaskan alokasi dana yang dianggap penting dan tidak dapat dikurangi untuk

---

<sup>20</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.50

<sup>21</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*,..... h.117-118.

memastikan kelancaran kegiatan pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Sementara itu, pengeluaran lain dapat dikurangi sesuai dengan anggaran yang tersedia.

b. Pada tingkat kerjasama bersama komite sekolah

Hal ini diperlukan untuk menyelenggarakan pertemuan antara pengurus dan anggota dalam mengembangkan kegiatan terkait pengembangan RAPBM.

c. Sosialisasi dan legalitas

pada tahap ini kelompok kerja akan berkonsultasi dan memberikan laporan kepada pihak pengawas, serta mengajukan proposal RAPBM kepada Kantor Wilayah Departemen Agama untuk evaluasi.

Sekolah perlu membentuk sebuah tim kerja yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menghitung kebutuhan biaya yang diperlukan, serta melakukan seleksi lokasinya setelah analisis kebutuhan dilakukan.

Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah, komite tersebut dapat memberikan masukan dan membantu dalam mengontrol kebijakan program sekolah. Kerjasama antara komite sekolah dan tim kerja dibentuk sehubungan dengan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS kemudian disosialisasikan dan diajukan kepada komite untuk diskusi, kemudian tim kerja akan

berkonsultasi dan melaporkan kepada pihak pengawas, serta mengajukan RAPBS kepada yayasan untuk dipertimbangkan dan disahkan.<sup>22</sup>

b) Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan pembiayaan digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Menurut Mulyasa, pelaksanaan keuangan sekolah dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.<sup>23</sup>

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sehingga semua sumber daya dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 29, “pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa.”<sup>24</sup>

Pelaksanaan keuangan sekolah secara garis besar dikelompokkan dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan penggunaan:

1) Penerimaan

---

<sup>22</sup> “Manajemen Pembiayaan Dalam Prestasi Akademik Dan Non Akademik,” n.d.

<sup>23</sup> Renny Mayasari, “Manajemen Keuangan dan Pembiayaan,” no. 02 (n.d.).

<sup>24</sup> Undang-undang RI No. 28 Tahun 2007

Penerimaan keuangan sekolah harus dicatat sesuai ketentuan yang telah disepakati, penerimaan dana sekolah berasal dari pemerintah berupa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dari masyarakat seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Pembukuan dalam penerimaan biaya Pendidikan pada umumnya didasari pada prosedur pembukuan yang sepadan dengan ketetapan yang sudah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Penanggungjawab dalam segala penerimaan atau pendapatan biaya Pendidikan dipegang sepenuhnya oleh bendara lembaga Pendidikan yang bersangkutan dengan kepala sekolah. Sekolah mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti orang tua murid, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan alumni.

## 2) Pengeluaran

Dana masyarakat dan dana pemerintah harus dikelola secara efektif dan efisien. Pengeluaran dana tidak hanya pada kegiatan utama seperti belajar mengajar tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler. Pengeluaran dana harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar tidak terjadi pemborosan. Dalam manajemen sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format laporan daya

serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.<sup>25</sup>

c) Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan Evaluasi pembiayaan pendidikan melibatkan evaluasi menyeluruh dari seluruh rangkaian proses pendanaan, dimulai dari awal hingga akhir. Dalam konteks ini, evaluasi pembiayaan pendidikan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab yang dapat tercermin dalam laporan keuangan pendidikan.<sup>26</sup>

Mulyasa menegaskan bahwa evaluasi keuangan sekolah adalah menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta bagaimana membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.<sup>27</sup>

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses evaluasi pembiayaan pendidikan diantaranya:

1. Pemantauan/ monitoring
2. Pemeriksaan penggunaan anggaran
3. Pelaporan penggunaan anggaran pendidikan<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Yudha Adwin Sefali, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Muhammadiyah Gisting Tanggamus," n.d.

<sup>26</sup> Nuril Azizah Megananda, "Manajemen Pembiayaan Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo," 2018.

<sup>27</sup> E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Rosdakarya, 2007), 175

<sup>28</sup> Zaky Fedayin Ardhan, "Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto," n.d.

Dapat disimpulkan evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan proses pemantauan, pemeriksaan, dan pelaporan apakah pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan rencana anggaran sekolah (RAPBS) yang telah ditetapkan, yang tujuannya untuk membantu mengambil keputusan dan membantu meningkatkan rencana kedepannya. Evaluasi pembiayaan pendidikan memungkinkan sekolah dapat mengetahui berapa dana yang dikeluarkan dalam anggaran dan sejauh mana program pendidikan yang sudah dibuat berjalan dan apakah anggaran yang telah disediakan di program tersebut tepat sehingga tidak terjadi pemborosan dana pendidikan.<sup>29</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003<sup>30</sup> yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan pendidikan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Berikut prinsip-prinsip manajemen pembiayaan, yaitu:

##### **a. Transparansi**

Dapat diartikan sebagai keterbukaan mengenai sumber pendanaan, spesifik mengenai berapa banyak yang digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

##### **b. Akuntabilitas**

---

<sup>29</sup> Yudha Adwin Sefali, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Muhammadiyah Gisting Tanggamus," n.d.

<sup>30</sup> UU No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS BAB XIII Pasal 48 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan

Tanggung jawab Kualitas kinerja seseorang dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang akan menjadi tugasnya akan dinilai oleh orang lain, dan kondisi ini dikenal sebagai akuntabilitas.

c. Efektivitas

Proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dirasakan sebagai efektivitas. Apabila tindakan yang dilakukan dapat mengelola dana yang Pasal tersedia untuk membiayai kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan, maka pengelolaan keuangan dapat dikatakan memenuhi konsep efektifitas.

d. Efisien

Efisiensi menempatkan fokus pada hasil dari suatu tindakan. Selain itu, efisiensi menurut definisi adalah cara terbaik untuk membandingkan input dan output atau daya dan hasil. Kekuatan yang dimaksud terdiri dari waktu, uang, tenaga, dan pikiran.<sup>31</sup>

## **B. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

### **1. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah fasilitas dan infrastruktur yang terkait dengan pendidikan.<sup>32</sup> Sarana dan prasarana merupakan peran penting dalam mendukung kelancaran serta memudahkan proses pembelajaran. Menurut Qomar yang dikutip di jurnal

---

<sup>31</sup> Haekal, T. M., KS, M. M., Yusuf, M. I., Wahyudi, M. A., Fajri, Y., Pd, M., ... & Rhomantoro, R. A. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. Media Sains Indonesia.

<sup>32</sup> R. Ananda and O. K. Banurea, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan" (repository.uinsu.ac.id, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id/3582/1/3.%20BUKU%20MANAJEMEN%20SARANA%20PRASARANA.pdf>.

oleh Novianti Dita Sari yang mengatakan bahwa sarana adalah semua peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya Gedung, ruang kelas, meja, kursi, dll. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Misalnya halaman, kebun, taman sekolah, dll.<sup>33</sup>

Menurut E. Mulyasa menerangkan bahwa sarana pendidikan merupakan perlengkapan yang secara langsung untuk menunjang proses pendidikan. Khususnya proses belajar mengajar, seperti meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran yang ada dikelas. Sedangkan prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran atau segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam menunjang manajemen pendidikan yang baik. Menurut Ketentuan Umum Permendiknas No. 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting yang dikelola dengan baik di sekolah. Untuk itu perhatian terhadap pengelolaan semua sarana dan prasarana memang diprioritaskan demi terwujudnya tujuan utama dari pendidikan.

---

<sup>33</sup> Novianti Dita Sari, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan," 2021.

Dengan demikian sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung proses pendidikan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana pendidikan sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin dengan mengikuti kebutuhan-kebutuhan seperti: Lengkap, siap dipakai setiap saat, kuat dan awet

1. Rapi, indah dan bersih. Sehingga menyejukkan pandangan bagi siapapun yang memasuki kompleks Pendidikan
2. Kreatif, inovatif, dan bervariasi. Sehingga dapat merangsang timbulnya imajinasi bagi siswa
3. Memiliki tempat khusus untuk beribadah, seperti mushola atau masjid.<sup>34</sup>

## **2. Tujuan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan prasarana pendidikan tujuannya secara umum menyediakan fasilitas dan layanan yang profesional dalam hal bidang sarana prasarana dengan tujuan untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa tujuan dari sarana dan prasarana pendidikan yaitu:

- 1) Dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan nyaman, sehingga mampu menciptakan rasa senang bagi warga sekolah.
- 2) Dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitatif yang sesuai untuk kepentingan Pendidikan Oleh karena itu, tujuan dari sarana dan prasarana

---

<sup>34</sup> Irjus Indrawan, *Pengantar Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah* (Deepublish, 2015), hlm. 10-11.

pendidikan adalah agar dapat melakukan hal yang dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi tercapainya proses pembelajaran dalam menetapkan tujuan pendidikan.<sup>35</sup>

### **3. Prinsip-prinsip Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar tercapainya tujuan dengan maksimal. Berikut prinsip-prinsip menurut Bafadal yaitu:

- 1) Prinsip Pencapaian Tujuan, adalah sarana dan prasarana Pendidikan yang ada di sekolah harus dengan keadaan siap pakai apabila akan dipergunakan oleh masyarakat sekolah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran di sekolah.
- 2) Prinsip Efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan yang dilakukan melalui perencanaan, maka dapat diadakan sarana Pendidikan yang baik.
- 3) Prinsip Administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana Pendidikan harus selalu diperhatikan Undang-Undang, peraturan diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
- 4) Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana Pendidikan harus di pertanggung jawaban kepada masyarakat sekolah yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>35</sup> TD Abeng Ellong, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 11, no. 1 (2018).

- 5) Prinsip Kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana Pendidikan harus diwujudkan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak<sup>36</sup>

#### 4. Fungsi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan dapat dinilai dari sejauh mana sarana dan prasarana tersebut berfungsi atau tidak berfungsi dalam mendukung proses pembelajaran. menurut Dikdasmen Depdikbud dalam Nur Fatmawati menyatakan bahwa fungsi sarana pendidikan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses belajar sangat vital untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan memegang peran sentral dalam proses pembelajaran di kelas, membantu kelancaran dan memudahkan transfer pengetahuan dari guru kepada murid. Ketersediaan sarana pendidikan yang komprehensif dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada murid.<sup>37</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi-fungsi berikut: (a) memfasilitasi penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa, (b) membantu siswa dalam memahami konsep pembelajaran, (c) mendukung kelancaran proses pembelajaran, dan (d) menghubungkan pemahaman siswa dari konsep kongkrit ke abstrak.

---

<sup>36</sup> Rahmatul Insyirah, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Mts Muslimat NU Palangka Raya," 2018, hlm. 22-23.

<sup>37</sup> Nur Fatmawati, Andi Mappincara, and Sitti Habibah, "Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2019.

## C. ICT (*Information Communication and Technology*)

### 1. Pengertian ICT(*Information Communication and Technology*)

ICT (*Information Communication and Technology*) merupakan salah satu teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang akan digunakan untuk belajar mengajar. Internet merupakan salah satu bukti saat ini sangat berkembang, hampir seluruh masyarakat mengenal dan menggunakan internet tidak terkecuali siswa, siswa juga menjadi salah satu yang dapat diuntungkan karena perkembangan internet pada saat ini.<sup>38</sup>

Menurut H. Muhammad Yusuf Rahim menjelaskan bahwa *Information and Comunication Technology* (ICT) dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan TIK yang mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang mana teknologi informasi merupakan teknologi yang akan digunakan untuk mengolah data maka data dapat diubah menjadi informasi. Teknologi informasi bukan hanya berupa komputer, tapi juga berupa perlatan lain yang mempunyai prinsip kerja yang sama atau dapat berfungsi pengganti komputer, misalnya handphone, iphone dan tablet. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan teknologi dalam penyebaran informasi baik untuk tingkat regional ataupun internasional. Teknologi komunikasi juga meliputi Semua aspek yang terkait dengan penggunaan perangkat yang memungkinkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Septiana Dwi Puspita Sari, "Manfaat Media Pembelajaran Berbasis ICT (*Information and Communication Technology*) Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia," 2016.

<sup>39</sup> Kusmayadi, Ir Eka, and M Hum. "Dasar-dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi," n.d.

Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *technologia* atau *techne* yang berarti keahlian dan *logia* berarti pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwasanya teknologi adalah sesuatu yang mengacu pada objek yang digunakan untuk memudahkan kegiatan manusia.

Teknologi juga mencakup pengertian sistem, organisasi dan teknik. Teknologi semakin luas seiring perkembangan zaman. Teknologi ini bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia, teknologi diciptakan agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, mudah dan singkat.

## **2. Manfaat dan Tujuan ICT (*Information Communication and Technology*)**

ICT memiliki banyak manfaat dalam membantu pekerjaan manusia. ICT dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Seperti sebagai pendukung kinerja sistem pendidikan, ICT juga bermanfaat sebagai media dalam proses pembelajaran. Manfaat ICT dalam pembelajaran merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Hal ini diikuti oleh perkembangan zaman sekarang ini. Komputer mini (*Notebook*) dikeluarkan niat awal hanya dikonsumsi oleh pelajar, yang merupakan jalan bagi dunia pendidikan dalam memanfaatkan ICT tersebut dalam proses pembelajaran.

Menurut Abdulhak sebagaimana dikutip oleh Ade Afni Utari dan Syafwatul Putria Hidayatullah bahwa manfaat dari ICT ada tiga yaitu:

---

- 1) ICT sebagai media (alat bantu) pendidikan yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan.
- 2) ICT sebagai sumber informasi dan mencari informasi.
- 3) ICT sebagai sistem pembelajaran

Dalam suatu sistem yang akan digunakan tentunya terdapat banyak manfaat dari sistem yang akan dipakai dan juga dikembangkan. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran juga dapat mempermudah proses belajar mengajar berlangsung agar guru dan siswa dapat belajar dengan menyenangkan dan inovatif.<sup>40</sup>

Pemanfaatan *Information communication technology* (ICT) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas jangkauan akses layanan pendidikan. Selain itu ICT juga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas Pendidikan melalui pelatihan pendidik secara nasional.

Adapun Tujuan ICT merupakan untuk memastikan peserta didik bisa menggunakan dengan baik dan pendidik dapat memfasilitasi pembelajaran, pengajaran, dan pengetahuan. Dan Adapun tujuan lain untuk memastikan siswa tidak bosan akan pembelajaran yang tidak monoton. Maka ICT diperlukan untuk bahan pengajaran, seperti materi berupa animasi, dll. ICT digunakan dalam pembelajaran berupa tutorial yang akan digunakan untuk menyampaikan pembelajaran yang telah ditetapkan.

### **3. Peran ICT (*Information Communication and Technology*)**

---

<sup>40</sup> Ade Afni Utari, “*Manfaat ICT Sebagai Media Pembelajaran Di SD Dharmajaya Palembang,*” 2019.

Setelah mengetahui apa itu ICT, maka kita juga harus mengetahui apa saja peranan didalamnya. Sebelumnya, ditahap peningkatan kualitas yang semakin menuntut manusia untuk melakukan banyak sekali aktifitas yang akan dibutuhkan dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki. Dan tanpa disadari sebagian aktifitas yang dilakukan manusia sudah didukung oleh teknologi baik teknologi informasi maupun teknologi komunikasi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (*Information and Communication Technology*) sebagai berikut:

a. Dalam bisnis

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam konteks bisnis sering digunakan untuk mendukung operasi perusahaan, baik dalam sektor ekonomi maupun perbankan. Berbagai aplikasi seperti e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lainnya digunakan. Penerapan TIK ini dapat menyebabkan perubahan dalam norma kerja.

b. Bidang pendidikan

Penerapan ICT pada bidang pendidikan juga mempengaruhi perkembangan teknologi pembelajaran. Dalam aplikasi pembelajaran seperti teknologi audio/data, video/data, audio/video dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar secara jauh (*E-Learning*). Dengan adanya e-learning maka setiap peserta didik bisa mengakses pembelajaran yang di sediakan di website. Peserta didik dapat berinteraksi dengan pendidik tanpa hadir dikelas. Materi pembelajaran bisa berupa online,

membuat siapa saja bisa mengakses materi tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu.